BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perkembangan perekonomian diarahkan untuk mencapai masyarakat yang sejahtera secara lahir dan batin, dimana pembangunan ekonomi sebagai penggerak utama seiring dengan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan bidang lainnya yang dilaksanakan seirama, selaras, dan serasi dengan keberhasilan pembangunan. Keberhasilan pembangunan yang telah dicapai dalam bidang ekonomi tersebut tentunya tidak lepas dari adanya peran serta masing-masing pelaku ekonomi yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha milik Swasta (BUMS), dan Koperasi serta peran masyarakat yang terlibat di dalamnya.

Salah satu pihak yang berperan dalam mengembangkan perekonomian adalah koperasi. Koperasi merupakan suatu badan usaha bersama yang bersifat kekeluargaan yang diharapkan mampu menjadi soko guru dalam perekonomian Indonesia. Hal ini dinyatakan dalam UUD 1945 Pasal 33 Ayat 1 yang menyatakan bahwa :

"Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan".

Koperasi adalah salah satu bentuk usaha berbadan hukum yang berdiri di Indonesia. Menurut undang-undang nomor 25 tahun 1992 pasal 1 ayat 1 tentang perkoperasian, koperasi Indonesia adalah badan usaha yang beranggotakan orang–

seseorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. (Pasal 3 :UU Koperasi)

Salah satu bentuk koperasi adalah koperasi karyawan yaitu koperasi yang beranggotakan karyawan-karyawan satu perusahaan dimana koperasi karyawan itu berada. Secara langsung dan tidak langsung, koperasi mempunyai peran yang positif dan besar dalam pelaksanaan pembangunan nasional di Indonesia. Koperasi merupakan sarana penigkatan kemajuan ekonomi, yaitu bagi anggota koperasi dan juga bagi masyarakat. Hal ini sesuai dengan tujuan koperasi yaitu memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Oleh karena itu, koperasi harus dapat menjalankan fungsinya sesuai dengan visi dan misinya yaitu mensejahterakan anggota dan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan penting lainnya. Koperasi dalam mencapai tujuannya harus selalu memperhatikan pengelolaan dalam sistem akuntansi yang menyangkut tentang segala macam kegiatannya.

Perkembangan koperasi sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain : manajemen atau struktur modal, partisipasi anggota, keadaan lingkungan yang berubah, iklim yang diciptakan pemerintah, dan persaingan yang mungkin

terjadi dari para pelaku ekonomi lainnya. Untuk mewujudkan tujuan koperasi yaitu mensejahterakan anggotanya pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, maka pembinaan koperasi diarahkan pada pemantapan dan peningkatan usaha koperasi dalam memenuhi pelayanan para anggota, sehingga pada akhirnya koperasi akan semakin kuat dan mampu memberikan pelayanan yang maksimal.

Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung (KPKB) yang menjadi tempat penulis melaksanakan kerja praktek merupakan koperasi pegawai yang merupakan salah satu badan usaha yang beranggotakan para Pegawai Negeri Sipil Pemerintah di sekitar wilayah Kota Bandung. Dalam menjalankan usahanya koperasi ini memiliki beberapa unit usaha, diantaranya :

1. Unit Usaha Simpan Pinjam
2. Unit Usaha Niaga
3. Unit Usaha Jasa

Unit Usaha Simpan Pinjam merupakan primadona usaha KPKB dalam memenuhi kebutuhan anggota setiap bulannya yang terus mengalami peningkatan, untuk memperoleh pinjaman dari Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung. Tugasnya mengkoordinir pelaksanaan kegiatan usaha dibidang simpan pinjam yang meliputi keanggotaan, analisa kredit, dan proses kredit uang.

Unit usaha Jasa mempunyai tugas untuk mengkoordinir pelaksana kegitan pencarian pekerjaan, pengelolaan gedung serbaguna dan pelaksanaan proyek.

Dalam hal ini unit usaha niaga, yaitu unit yang tugas peran dan fungsinya adalah mengkoordinir pelaksanaan kegiatan usaha niaga meliputi urusan

pembelian, urusan gudang/tokok, urusan proses kredit dan marketing, dan tentunya tidak lepas dari persediaan barang dagangan.

Konsumen dalam instansi Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung (KPKB) yaitu adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah di sekitar wilayah Kota Bandung, yang sekaligus berperan sebagai anggota koperasi.

Setiap perusahaan, apakah perusahaan itu perusahaan perdagangan ataupun perusahaan industri serta perusahaan jasa termasuk koperasi selalu mengadakan persediaan. Persediaan barang dagangan sangat berperan dalam menunjang jalannya aktivitas usaha, oleh karena itu para pengusaha atau pemilik kegiatan usaha tersebut harus dapat mengelola persediaannya dengan baik.

Dalam hal ini yang paling penting adalah bagaimana perusahaan mengelola persediaannya baik perencanaannya maupun pengendaliannya. Dengan membuat perencanaan barang dagangan yang baik, akan sangat membantu masyarakat atau konsumen dalam memenuhi kebutuhannya. Kegiatan perencanaan ini bukanlah hal yang mudah untuk di lakukan , karena dalam perencanaan tersebut haruslah ditentukan jumlah yang tepat, barang dagangan yang akan dijual harus sesuai dengan sesuai dengan selera konsumen dan harus di sediakan dalam waktu yang tepat.

Persediaan barang dagang pada suatu perusahaan atau koperasi pasti berbeda antara satu dengan yang lainnya. Didalam perusahaan dagang atau nanufaktur (industri) persediaan barang dagang dikelompokkan dalam tiga kategori yaitu: persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses dan persediaan barang jadi. Persediaan barang dagang bagi perusahaan atau koperasi

merupakan asset yang paling besar, karena maju mundurnya suatu perusahaan atau koperasi ditentukan oleh persediaan barang dagangnya. Didalam suatu perusahaan atau koperasi persediaan terdiri atas barang dagangan yang dimilki dan dikuasai oleh perusahaan atau koperasi untuk dijual kepada para pelanggan.

Barang dagangan (*inventory)* adalah sesuatu yang mempunyai nilai manfaat untuk memenuhi kebutuhan setiap orang baik yang bersifat konsumtif, maupun sebagai kebutuhan lainnya yang tidak kalah pentingnya yang di perjual belikan, sebagai bagian yang terpenting juga dalam menjalankan aktifitas kegiatan usaha suatu perusahaan, terutama yang bergerak dalam bidang dagang maupun industri..

Persediaan dikonverensikan kedalam kas, dalam siklus operasional perusahaan atau koperasi dan oleh karenanya persediaan dianggap sebagai aktiva lancar. Perusahaan atau koperasi dalam melakukan transaksi persediaan barang dagangnya biasanya melakukan penilaian dan pencatatan persediaan serta penetapan harga pokok penjualan. Dimana dalam pencatatan persediaan dan penilaian tidak terlepas dari suatu aturan-aturan/metode-metode yang digunakan oleh perusahaan atau koperasi. Dengan demikian arti penting jumlah persediaan didalam perusahaan atau koperasi jangan disepelekan.

Persediaan merupakan suatu elemen yang penting bagi perusahaan dagang. Jumlah persediaan yang tinggi memang dapat membuat perusahaan atau koperasi memenuhi kebutuhan konsumennya, namun persediaan yang tinggi dapat menghambat kegiatan perusahaan atau koperasi, karena sebagian besar dana

perusahaan tertanam dipersediaan dan tidak dapat diputarkan lagi. Untuk itu jumlah optimum persediaan yang dimilki perusahaan atau koperasi

dapat juga mempengaruhi tingkat keuntungan yang diperoleh perusahaan atau koperasi.

Tanpa adanya persediaan, para pengusaha akan dihadapkan pada resiko bahwa perusahaannya pada suatu waktu tidak dapat memenuhi keinginan pelanggan yang memerlukan atau meminta barang/jasa. Persediaan diadakan apabila keuntungan yang diharapkan dari persediaan tersebut hendaknya lebih besar daripada biaya-biaya yang ditimbulkannya. Persediaan bagi koperasi yaitu merupakan barang-barang yang dibeli oleh koperasi dengan tujuan untuk dijual kembali dengan tanpa mengubah bentuk dan kualitas barang, atau dapat dikatakan tidak ada proses produksi sejak barang dibeli sampai dijual kembali oleh koperasi.

Dalam pengelolaannya persediaan membutuhkan proses dalam pengelolaannya. Dalam persediaan juga khususnya bagi koperasi juga dibutuhkan pencatatan dalam pengelolaannya

(Fidlah, Juli, 2010) Proses adalah urutan pelaksanaan atau kejadian yang terjadi secara alami atau didesain, mungkin menggunakan waktu, ruang, keahlian atau sumber daya lainnya, yang menghasilkan suatu hasil. Suatu proses mungkin dikenali oleh perubahan yang diciptakan terhadap sifat-sifat dari satu atau lebih objek lebih objek di bawah pengaruhnya. proses juga dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk mencapai sesuatu.

Selain itu proses adalah urutan pelaksanaan atau kejadian yang terjadi secara alami atau didesain, mungkin menggunakan waktu, ruang, keahlian atau

sumber daya lainnya, yang menghasilkan suatu hasil. Suatu proses mungkin dikenali oleh perubahan yang diciptakan terhadap sifat-sifat dari satu atau lebih objek di bawah pengaruhnya.

Pencatatan dalam persediaan yaitu pengumpulan data secara teratur tentang peredaran barang dagangan sebagai acuan dalam mengambil keputusan dalam melakukan kebijakan perusahaan dimasa yang akan datang. Peranan pencatatan sangatlah penting terutama bagi perusahaan di bidang dagang maupun industri, pencatatan juga diaplikasikan dengan proses akuntansi itu sendiri.

Selain melakukan pencatatan bagian pencatatan persediaan juga melakukan pengawasan terhadap persediaan barang dagangan.

Dalam pelaksanaannya pencatatan persediaan persediaan pada Koperasi pegawai pemerintah Kota Bandung tidak terlepas dari kendala, diantaranya adalah bagaimana keadaan persediaan yang tersedia di toko mengalami kehilangan, kadaluarsa dan kerusakan.

Persediaan barang dagangan yang mengalami kehilangan sebagian besar terjadi ketika barang itu sudah terdapat di toko, sehingga dapat terjadi perbedaan pencatatan persediaan barang dagangan yang telah di catat sebelumnya dengan keadaan persediaan barang dagangan yang ada di toko, hal ini terjadi lebih kepada faktor pengawasan dalam suatu persediaan barang dagangan, barang yang hilang tentunya harus dig anti oleh bagian manajemen resiko dalam Koperasi.

Tingkat kadaluarsa suatu barang sering terjadi pada semua jenis barang persdian, hal ini masih sering terjadi juga terjadi akibat kurangnya tingkat pengecekan secara teliti di toko tempat barang itu dijual belikan, sehingga

mengakibatkan perbedaan yang sangat menonjol dalam suatu pencatatan persediaan barang dagangan barang itu telah mengalami kadaluarsa, sehingga harus dilakukan penarikan dan mengganti dengan yang baru, sementara di toko masih ditemukan barang tersebut diperjual belikan, dalam pencatatan persediaan barang dagangan harus tentunya dilakukan pencatatn persedian dengan melakukan retur barang dengan catatan barang tersebut masih bias dikembalikan kepada pemasok yang secara langsung.

Kerusakan tentunya pasti ditemukan dalam setiap persedian yang dibeli oleh koperasi, sehingga dalam hal pencatatan sendiri seharusnya dilakukan retur suatu barang apabila kerusakan terjadi akibat dari kesalahan si pemasok, akan tetapi apabila kerusakan terjadi ketika kesalahan yang dilakukan oleh pihak toko, sebaiknya dilakukan pencatatan penggantian barang yang mengalami kerusakann digantikan oleh pihak manajemen resiko.

Dengan melihat latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk membahas masalah tersebut dan dalam penulisan ini mengambil judul **“ Tinjaun Atas Pencatatan Persediaan Barang Dagangan Pada Unit Niaga Di Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung (KPKB)”.**

1.2 Identifikasi Masalah dan Perumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang, peneliti mengidentifikasikan masalah yaitu :

1. Sering terjadinya kehilangan suatu barang dagangan serta pencatatannya yang kurang terkontrol dengan baik.
2. Terjadinya kadaluarsa suatu barang dagangan serta pencatatannya.
3. Terjadinya suatu kerusakan barang dagangan serta pencatatannya.

1.2.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur pencatatan persediaan barang dagangan Unit Niaga di Koperasi pegawai Pemerintah Kota Bandung (KPKB) ?
2. Bagaimana pelaksanaan pencatatan persediaan barang dagangan pada Unit Niaga di Kopersi Pegawai Pemerintah Kota Bandung (KPKB)?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk meninjau dan menjelaskan pencatatan persediaan barang dagangan pada unit niaga di Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung.

Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui prosedur prosedur pencatatan persediaan barang dagangan Unit Niaga di Koperasi pegawai Pemerintah Kota Bandung (KPKB).

2. Untuk mengetahui pelaksanaan pencatatan persediaan barang dagangan pada Unit Niaga di Kopersi Pegawai Pemerintah Kota Bandung (KPKB).

1.4. Kegunaan Penelitian

Pada dasarnya penelitian ini dilakukan oleh penulis dalam rangka membandingkan teori yang telah dipelajari dalam perkuliahan dengan praktek, tentang pencatatan persediaan barang dagangan. Selain itu, penulis mengharapkan bahwa penelitian ini dapat memberikan sumbangan ilmiah dan bermanfaat bagi semua pihak.

1.4.1 Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan praktis bagi perusahaan dari penelitian ini adalah sebagai bahan masukan dalam yang berguna untuk membuat atau mengkaji kebijakan-kebijakan keuangan agar lebih efektif, efisien, ekonomis dan akuntabel khususnya terhadap Pencatatan Persediaan Barang Dagangan Pada Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung (KPKB).

1.4.2 Kegunaan Akademis

Adapun kegunaan akademis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi penulis

   Yaitu menambah pengetahuan dan mengenai pelaksanaan perncatatan persediaan barang dagangan baik teori maupun praktek.

2. Bagi pihak lain

   Sebagai sebagai bahan acuan dan bahan referensi khususnya untuk mengkaji masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian, mengenai pelaksanaan pencatatan persediaan barang dagangan.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Peneliti melakukan penelitian di Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung (KPKB) Jl. Wastukencana No. 05 Bandung 40117. Telepon (022) 4206476, Fax : (022) 4224036, e-mail : kpkb-bandung@bdg.centrin.net.id. Penelitian dilaksanakan pada bulan Februari sampai dengan bulan Juli 2011.

Tabel 1.1

Jadwal Pelaksanaan Penelitian

No	Kegiatan Penelitian	Bulan					
		Feb 2011	Maret 2011	April 2011	Mei 2011	Juni 2011	Juli 2011
I	Persiapan Penelitian						
	1. Permohonan Ijin Penelitian	■					
	2. Realisasi Ijin Penelitian		■				
	3. Penentuan Tempat Penelitian		■				
	4. surat penerimaan dari instansi			■			
II	Ujian Komprehensif		■				
III	Pelaksanaan Penelitian						
	1. Aktivitas Penelitian		■	■	■	■	■
	2. Bimbingan Penelitian		■	■	■	■	■
	pembimbing instansi						
IV	Pelaporan Penelitian						
	1. Konsultasi Dengan dosen		■	■	■	■	■
	Penelitian						
	2. Bimbingan dengan dosen		■	■	■	■	■
	Penelitian						
	3. Pembuatan Laporan Penelitian		■	■	■	■	
	4. Ujian Penelitian						■
	5. Final pembuatan laporan						■
	Penelitian						
	6.Pengumpulan Laporan Penelitian						■